

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Gunung Agung, 2002.
- Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- _____, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Penerbit Pusat Studi Hukum FH UII, 2001.
- David Johnston, Wiley-Black Well, *A Brief History of Justice*, 2011.
- Emanuel Sujadmiko, *Bentuk Hukum Kerjasama Antar Daerah*, Surabaya: Revka Petra Media, 2016.
- Faisal Akbar Nasution, *Dimensi Hukum Pemerintahan Daerah*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003.
- Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Jakarta: Rinerka Cipta, 2012.
- Gunarto Suhardi, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia (Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)*, Jakarta: Rajawali Press, 2005.
- _____, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II*, Surakarta: UNS Press, 1988.
- H.M. Busrizalti, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Yogyakarta: Total Media, 2013.

- Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk.Kelima, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015.
- H.R Otje Salman, S, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Pemikiran UUD Negara Kesatuan RI*, Jakarta: The Habibie Center, 2001.
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, cet, pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Joko Widodo, *Good Governance: Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Surabaya: Insan Cedeki, 2001.
- Kansil, *Pengantar Ilmu*, Jakarta: Balai Pustaka, 1992.
- Lawrence Meir Freidman, *Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2006.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Lilik Pudjiastuti, *Prinsip Hukum Pengaturan Perizinan Kefarmasian*, Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, 2013.
- Mhd. Shiddiq, *Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta; Pradnya Pramita, 2003.
- Munir Fady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Penerbit Alumni, 2002.
- Ni'matul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, Yogyakarta: FH UII Press, 2010.
- N.M Spelt dan J.B.J.M Ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M Hadjon, Surabaya: Yuridika, 1993.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan 7, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008.

- _____, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- R. Joeniarto, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 1992.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi* Yogyakarta: Rajawali Press, 2018.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1996.
- Sirajudin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara*, Malang: Setara Pers, 2015.
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: PT Revika Aditama, 2008.
- Sulistyowati Irianto dkk, *Kajian Sosio Legal*, Jakarta: Pustaka Larasan, 2012.
- Sobirin Malian, *Gagasan perlunya konsitusi Baru Pengganti UUD 1945*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2012.
- Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Tri Hayati, *Era Batu Hukum Pertambangan Di bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Yance Arizona, *Konstitusionalisme Agraria*, Yogyakarta: STP Press, 2014.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; LN RI: 2009-4; TLN:4959.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; LN RI: 2020-147; TLN:6525.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD; LN RI: 2014-182; TLN: 5568.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; LN RI:2014-244; TLN: 5587.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; LN RI: 2004-126; TLN: 4438.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; LN RI: 2021-35; TLN: 6637.

C. Jurnal

Abrar Saleng, *Kapita Selekta Hukum Sumber Daya Alam*, Makassar: Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasannuddin, Makassar, Volume 12 Nomor 4 Juli, 2013.

Bagir Manan, “*Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*”, Makalah: Seminar Nasional, Fakultas Hukum Unpad, 2000.

Budiyono DKK, *Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor 67, Tahun XVII Desember 2015.

Lilis Supriatin dan Suwari Akhmaddhian, *Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan Pasca Berlakunya Undang-Undang Pemerintah Daerah (Studi di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat)*, Jurnal Unifikasi, Vol. 04, No. 02, Juli, 2017.

Mirza Satria Buana, *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010.

Modul 1 Sosialisasi Sistem AKIP, *Akuntabilitas dan Good Governance*, Jakarta: LAN dan BPKP, 2001.

Pan Mohamad Faiz, “*Teori Keadilan John Rawls*”, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, 2009.

The Legal Philosophies of Lask, Radburch, and Dabin, Vol IV, *Twentieth Century Legal Philosophy Series*, Translated by Kurt Wilk. Introduction by Edwin W. Patterson. Cambridge: Harvard University Press, 1950.

Syarif Hidayat, *Desentralisasi Otonomi Daerah dan Transisi Menuju Demokrasi: Masukan untuk UU No. 32 Tahun 2004*, Paper Presented at Seminar Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Jatinangor-Jawa Barat, 21 Juni 2010.

D. Website

Iqbal Shalihin, “Pengalihan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral-Batubara Oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”; Program Studi Magister Ilmu Hukum, 2018, Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang; <http://scholar.unand.ac.id/34679/5/tesis%20full.pdf>

e-jurnal.peraturan.go.id

<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/hingga-2030-permintaan-energi-dunia-meningkat-45->

<https://www.esdm.go.id/id/media-center/news-archives/cadangan-batubara-indonesia-sebesar-26-miliar-ton>

<http://www.apbi-icma.org/en/indonesian-coal-data>,

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190805/9/1132534/bps-pertumbuhan-sektor-pertambangan-penggalian-turun->

<https://pushep.or.id/daftar-perusahaan-pkp2b-yang-kontrak-habis-tahun-2020-2025/>

E. Sumber Lainnya

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Perkara Nomor 10/PUU-X/202.

Siaran Pers Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 317.Pers/04/SJI/2020 Tanggal 27 Oktober 2020.

Siaran Pers Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 009.Pers/04/SJI/2021 Tanggal 8 Januari 2021.